BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah otonom maka pada penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan Daerah dalam menerapkan suatu peraturan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dalam Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Hukum (rechstaat) serta bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).¹ Hal ini berarti bahwa Negara republik Indonesia adalah Negara yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi serta menjamin persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah, keduanya merupakan unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan yang diserahkan kepada

¹ Evi Hartati, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, 2009 hlm.1.

daerah. Dalam hal mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.²

Pada masa Pandemi covid-19 ini Pemerintah Indonesia telah berusaha mencegah penularan dan penyebaran covid-19 dengan mengeluarkan suatu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru.³ Upaya pemerintah yang dilakukan secara sistematis perlu dilakukan guna memulihkan kembali sektor perekonomian. Salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yakni memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dinilai sanggup mengatasi Covid-19 dengan melaksanakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah "new normal". Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020). Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 gencar mensosialisasikan Gerakan 3 M di masa adaptasi kebiasaan baru. Gerakan 3 M tersebut meliputi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Gerakan ini merupakan salah satu upaya dan sebagai protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

² I Wayan Gede Suacana, 2013, **Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa**, PT. Revka Petra Media, Surabaya, hlm.25.

³ Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiah Isbaniah, Erlina Burhan dan Heidi Agustin, **Penyakit Virus Corona 2019**, Jurnal Daparteman Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, J Respir Indo Vol 40 No.2 April 2020.

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 Para Gubernur, Bupati, dan Walikota diberi ruang untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang memuat salah satunya adalah ketentuan kewajiban memenuhi protokol kesehatan dan memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Penanganan Covid- 19 di Bali, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur bali mengingatkan Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten yang terdampak Pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak tinggal diam menanggapi maraknya penyebaran Covid-19, salah satu tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah bupati yakni membentuk Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Tujuan dari peraturan Bupati bangli Nomor 39 Tahun 2020 tertuang pada pasal (3) yang berbunyi :

- a. Meningkatkan partisipasi aktif Krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
- b. Mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru COVID-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan;
- c. Meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi COVID-19; dan

- d. Terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Adanya suatu peraturan pasti ada penegak hukumnya, Pemerintah Daerah memiliki aparat/perangkat daerah untuk menegakkan perda dan perkada yang ada pada suatu daerah, dalam hal ini perangkat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁴

Satpol PP berwenang melakukan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam Penegakan Protokol ini dipertegas dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 10 Bupati menugaskan Kepala Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) dengan mengikutsertakan perangkat daerah untuk

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

melakukan pengawasan. Penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP Damkar dan dapat mengikut sertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/TNI.⁵ Dengan demikian Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan wajib menggunakan masker di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020.

"Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan Daerah, di mana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum."⁶ Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut keamanan dan ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menjadikan peranan Satuan polisi Pamong Praja memiliki tugas dan wewenang yang sangat sangat strategis sebagai aparatur membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur

⁵ Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

⁶ Mansyur Cholil, 2008, **Reformasi Otonomi Daerah**, Liberty, Yogyakarta, hlm.63

sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Koordinasi menjadi salah satu momok permasalahan yang sampai saat ini gampang diucap sulit dilaksanakan. Oleh karena itu dalam implementasi koordinasi diperlukan penegasan dalam sebuah kebijakan sehingga peran dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja dapat lebih sinergi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan observasi di lapangan masih saja ada masyarakat di Kabupaten Bangli melanggar protokol kesehatan, adanya pelanggaran di lapangan seperti yang terjadi di pusat perbelanjaan, masih adanya sebagian warga yang tidak memakai masker di kerumunan, tanpa menerapkan physical distancing. Padahal hal tersebut justru menimbulkan risiko penularan Covid-19. Hal tersebut bertentangan dengan semangat pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangli. Berdasarkan Permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dalam menegakkan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli.

Maka sangat relevan dan perlu untuk dilakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi berdasarkan uraian di atas, penulis berniat mengkaji tentang : **Peran Satuan Polisi pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan di kabupaten Bangli Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas maka ruang lingkup masalah dibatasi dalam dua hal yaitu mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 dan Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang paling penting dalam penulisan skripsi. Dimana tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi. Dalam sebuah penelitian tujuan penelitian merupakan hal yang wajib dipenuhi bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas skripsi ini.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk Perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran. Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, sedangkan dalam penentuan metode mana yang harus digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dipertanggungjawabkan dapat tercapai.⁷

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam

⁷ Soejono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.1

penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris ini juga dilakukan dengan melihat perubahan sosial yang terjadi menurut kesesuaian dengan peraturan yang berlaku serta menelaah eksistensi hukum dan fungsi dari hukum itu sendiri di masyarakat.⁸ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁹ Berkerjanya hukum dalam masyarakat dapat di kaji dari tingkat evektifitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.¹⁰

Maka oleh karena itu penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena membahas tentang “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli”.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Dimana dengan pendekatan tersebut peneliti dapat

⁸ Wiradipraja, E. Saefullah, 2015, **Penuntun Praktis Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum**, Kemi Media, Bandung,Hlm.36.

⁹ Idtesis.com, 2013, **Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif**, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021

¹⁰ HS. H Salim Dan Septiana Nurhani Erlies , 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Dan Disertasi** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.20

memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya.¹¹

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan suatu yang paling vital dalam penelitian, kesalahan dalam memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh akan meleset dari yang diharapkan oleh karena itu peneliti harus memahami sumber data yang digunakan.¹²

Dalam penulisan empiris ini, menggunakan sumber data, yaitu:

1. Data Hukum Primer

Data yang bersumber pada penelitian di lapangan ini didapat dari hasil wawancara.¹³ Yakni data yang diperoleh langsung dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli. Data primer dalam penulisan skripsi ini bersumber dari kenyataan yang terjadi di lapangan setelah

¹¹ Abdulkadir Muhamad,2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, PT Aditya Karya Yogyakarta, Hlm 201.

¹² Masyuri ,2008, **Metode Penelitian Hukum** , Refika Aditama, Jakarta, Hlm.76.

¹³ *Ibid*, Hal.78.

terjadinya pelaksanaan penegakan protokol kesehatan oleh unit Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli.

2. Data Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang menunjang data primer yaitu berupa literatur, hasil penulisan, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun data sekunder bersumber dari bahan- bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa kaedah dasar, peraturan perundang- undangan, hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*text book*), majalah, surat kabar, serta jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan yang menunjang pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.¹⁴

¹⁴ Sunggono Bambang 2018, **Metodelogi Penelitian**, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.114.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan terjun langsung ke lokasi penulisan untuk mengamati secara langsung kenyataan atau keadaan dari lokasi yang ingin diamati agar mendapat suatu informasi yang benar-benar sesuai dengan fakta. Observasi dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bangli yang beralamat di Jalan Lettu Sobat, Kawan, Kecamatan bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁵ Dalam hal ini yang menjadi narasumber dan responden adalah Kabid Trantibum Kabupaten Bangli, PPNS dan Kasi Penyelidikan dan Penindakan Kabupaten Bangli.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara analisis data kualitatif, yaitu dimana data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan diukumpulkan dan

¹⁵ Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , Alfabet** , Bandung , Hlm.192

dipilah serta dipilih yang paling relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dan disusun secara sistematis.¹⁶

Penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang tersusun secara sistematis kemudian di analisis agar menghasilkan data dengan kualitas yang baik, sehingga dapat memberikan gambaran dan penjelasan dengan maksud untuk membuktikan hipotesa sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan sesuai dengan pokok permasalahan serta ditafsirkan menurut data yang bersangkutan dengan situasi, sikap serta pandangan yang sedang terjadi di dalam masyarakat yang bertujuan mengungkap fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat melakukan penelitian dan sekaligus menggambarkan hasil yang diperoleh baik dalam bentuk teoritis maupun praktik analisis deskriptif kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas penelitian ini, dilakukan dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum Pendahuluan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, Jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

¹⁶ Danim Sudarwan, 2002, **Analisis Data Kualitatif**, UI-Press, Jakarta, hlm.209

BAB II :

Bab ini berisi tentang beberapa konsep yang diambil dari beberapa kutipan buku yaitu kajian teoritis yang berisikan terkait landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi diantaranya Teori Peran, Teori penegakan Hukum dan Teori Sistem Hukum serta Tinjauan Umum diantaranya Pengertian peran, Tugas Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pengertian Protokol Kesehatan dan Profil Umum Kabupaten Bangli.

BAB III

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa dari rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 di Kabupaten Bangli serta Peran Satuan polisi pamong Praja dalam Penegakan Protokol kesehatan di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020.

BAB IV :

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari rumusan masalah ke 2 terkait dengan Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli serta upaya Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli.

BAB V :

Bab ini berisi penutup berupa kesimpulan dan saran berdasarkan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya.